

ANALISIS KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN DI NEGARA TUJUAN

Studi Kasus Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia

Anwar Sitepu

ABSTRAK

Kebutuhan pelayanan sosial yang mendesak dilakukan di negara tujuan adalah pelayanan rehabilitatif dan preventif. Pelayanan rehabilitatif dilakukan bagi TKI yang sudah terlanjur menjadi korban dan sudah berada di shelter. Kondisi korban cukup bervariasi, dapat dikategorikan menjadi korban "luka" (fisik dan atau sosial-psikologis) dalam degradasi: parah, ringan atau sehat. Pelayanan rehabilitasi sosial-psikologik ditujukan untuk memulihkan rasa harga diri korban sebagai manusia bermartabat, sedapat mungkin yang bersangkutan dapat pulang kembali ke tengah keluarganya dengan "kepala tegak". Seluruh sistem pelayanan di shelter harus diupayakan sehingga korban merasa tidak sendirian, tunjukkan negaranya Indonesia (melalui aparat) mau peduli, menyayangi dirinya dan memahami masalahnya. Rehabilitasi psikososial juga dapat dilakukan dengan konsultasi individual dan kolektif. Petugas harus mendengar secara khusus perasaan, rasa kecewa, rasa terhinai, kecemasan korban dan memberinya bimbingan. Secara kolektif dapat dilakukan dengan teknik game-therapeutic. Melalui semua media diupayakan sehingga korban berkata kepada dirinya sendiri: "kali ini saya belum berhasil, tetapi dunia belum kiamat, nanti ditanah air saya akan bekerja lebih keras, pada saatnya saya akan berhasil". Pelayanan preventif perlu dilakukan dalam bentuk pemantauan secara berkala ke tempat pekerja migran bekerja. Pemantauan bukan sekedar memonitor pekerja migran tetapi sekaligus memberi bimbingan bagi kedua belah pihak jika ada indikasi permasalahan. Pemantauan berkala juga berfungsi sebagai sarana dukungan moral bagi TKI. Selain kedua pelayanan tersebut, pelayanan lain yang dibutuhkan TKI adalah penyelamatan (rescue) bagi TKI yang diperlakukan buruk tetapi masih berada di tempat kerja; dan pelayanan perlindungan (protectif) melalui perbaikan MOU antar pemerintah Indonesia dengan Malaysia agar lebih pro TKI.

Kata kunci : pelayanan sosial, pekerja migran

1. LATAR BELAKANG

Sekitar 10 tahun terakhir ada kecenderungan di mana semakin banyak warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Secara umum mereka disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat TKI. Secara khusus, TKI wanita disebut Tenaga Kerja Wanita, populer disingkat menjadi TKW. Di lingkungan Departemen Sosial, digunakan istilah "Pekerja Migran" untuk menyebut TKI termasuk TKW. Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sampai tahun 2006, terdapat sebanyak 4.927.351 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri (Kompas, Selasa, 28 Agustus 2007:18). Negara yang banyak menampung pekerja migran Indonesia adalah Malaysia, Korea, Hongkong, Jepang, Taiwan, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Seperti pekerja

migran negara berkembang pada umumnya, pekerja migran Indonesia mayoritas adalah pekerja kasar. Jenis pekerjaan yang dimasuki banyak pekerja migran Indonesia adalah pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh kebun dan buruh bangunan. Menurut catatan Depnakertrans RI, Malaysia adalah negara penerima terbanyak pekerja migran Indonesia, dari 4,9 juta total pekerja migran Indonesia, sebanyak 1,8 juta terdapat di Malaysia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Volume 12 No.3 tahun 2007)

Dalam perjalanannya hingga sejauh ini, banyak pekerja migran Indonesia (TKI), baik laki-laki maupun wanita, menghadapi masalah di luar negeri. Dampak dari permasalahan tersebut adalah penderitaan bagi korban maupun keluarganya. Tidak sedikit pekerja

migran pulang dalam kondisi luka fisik dan atau psikologis (stress, depresi) atau bahkan meninggal. Selain itu, permasalahan TKI atau pekerja migran juga cenderung merusak citra dan merendahkan martabat bangsa Indonesia secara keseluruhan di lingkungan pergaulan antar bangsa. Istilah "indon" di Malaysia misalnya digunakan warga setempat untuk menyebut orang Indonesia dengan asosiasi buruk, merendahkan martabat. Memperhatikan kasus-kasus yang muncul, seperti banyak diberitakan oleh media massa, pelayanan atas pekerja migran (TKI) perlu segera lebih dioptimalkan, berbagai instansi terkait dalam waktu secepatnya perlu memberi perhatian lebih serius. Departemen Sosial (Dep.Sos) sebagai instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang kesejahteraan sosial kiranya juga perlu secepatnya mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan perannya. Sampai sejauh ini peran Dep. Sos. masih terbatas pada dua hal, yaitu: pelayanan bantuan pemulangan pekerja migran bermasalah dari pelabuhan debarkasi di daerah perbatasan ke daerah asal dan melakukan terapi bagi yang memerlukan di rumah Trauma Center.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Dep.Sos. - khususnya melalui Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (Dit.BS KTK & PM) - Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) melakukan serangkaian penelitian, di dalam dan di luar negeri. Peneliti ini - pada awalnya diselenggarakan - untuk menjawab pertanyaan: "Pelayanan sosial apa yang dibutuhkan oleh pekerja migran bermasalah yang ditampung sementara di KBRI untuk mengurangi beban sosial-psikologis yang dirasakan?". Dalam perkembangan selama pengumpulan data berlangsung disadari bahwa beban sosial-psikologis pekerja migran bermasalah-seperti yang ditampung sementara di KBRI Kuala Lumpur-merupakan akibat dari perlakuan buruk yang dialami selama proses persiapan dan selama penempatan. Karena itu penelitian dikembangkan, tidak saja kebutuhan pelayanan sosial bagi pekerja migran bermasalah di shelter tetapi juga mencakup pekerja migran yang belum masuk shelter. Permasalahannya menjadi: "Pelayanan sosial apa yang dibutuhkan oleh pekerja migran di Negara tujuan?" Tujuan penelitian ini adalah

mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sosial bagi pekerja migran di negara tujuan, Malaysia. Hasil penelitian dimaksud sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah terutama pimpinan Dep.Sos. dalam menetapkan kebijakan penanganan pekerja migran pada umumnya dan pekerja migran bermasalah pada khususnya.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian dicapai melalui proses analitis. Dalam upaya memahami kebutuhan pelayanan sosial bagi pekerja migran di luar negeri, penelitian ini dimaksudkan mendapatkan gambaran tentang dua hal, pertama, gambaran pelaksanaan pelayanan sosial terhadap pekerja migran/TKI secara faktual di lapangan; dan kedua, gambaran permasalahan yang dialami pekerja migran. Karena itu, jenis penelitian yang dianggap sesuai adalah deskriptif. Suatu penelitian yang dimaksudkan menyajikan gambaran secara detail atas subjek penelitian dan setting sosial yang melingkupinya.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan permasalahan pekerja migran. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik: wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yaitu terdiri dari pekerja migran bermasalah dan petugas KBRI dan KJRI; observasi atas pekerja migran dan aktivitasnya di shelter; penulisan pengalaman pribadi oleh pekerja migran. Data skunder dikumpulkan dari dokumen terkait.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri umum pekerja migran bermasalah. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan kuesioner. Responden meliputi seluruh pekerja migran yang berada di shelter ketika pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni 2007. Dalam pelaksanaannya ditemukan sebanyak 113 orang pekerja migran bermasalah di shelter KBRI dan KJRI.

III. TINJAUAN TEORI

Konsep Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam

maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, 2004: 8). Definisi ini mengandung makna sangat luas dan umum, meliputi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pindah lintas batas Negara (ke luar negeri) maupun di dalam negeri. Definisi ini juga tidak membedakan sektor pekerjaan formal atau informal, domestik atau publik serta status hukum legal atau illegal.

Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tahun 2006 digunakan istilah *domestic worker* untuk menunjuk warga Negara Indonesia yang pindah sementara ke Malaysia untuk dikontrak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam MoU tersebut *domestic worker* yang dimaksud adalah: "*a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted for a special priode of time for specific individual as a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, the labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76)*". Definisi ini lebih spesifik menunjuk kepada warga Negara Indonesia yang dikontrak untuk periode waktu tertentu sebagai pembantu rumah tangga, sehingga tidak mencakup mereka yang bekerja tanpa kontrak. Dalam konteks penelitian ini pekerja migran yang dimaksud meliputi warga Negara Indonesia khususnya wanita yang pindah sementara ke luar negeri untuk bekerja pada *sector domestic* baik dengan kontrak maupun tidak.

Pelayanan Sosial

Sampai sejauh ini belum ada kesepakatan tunggal yang berlaku universal untuk menunjuk apa yang dimaksud dengan "pelayanan sosial". Konsep ini digunakan dan didefinisikan secara berbeda oleh berbagai pihak dan cenderung berubah dari waktu ke waktu (Neil Gilbert and Harry Specht (Ed); *Handbook of Social Services*; Prentice-Hall, Inc., Englewood, New Jersey, US). Di Amerika Serikat misalnya, pelayanan sosial sekitar tahun 1960-an diasosiasikan sebagai pelayanan bagi keluarga miskin, difokuskan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan dampak ikutannya. Sejak tahun 1980-an sesuai perkembangan sosial setempat - makna pelayanan sosial sudah bergeser tidak saja menanggulangi dampak ketergantungan ekonomi tetapi untuk semua

orang yang membutuhkan (universal). Sejak itu, pelayanan sosial mengandung makna mencakup seluruh upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berdasarkan hasil pertemuan tahun 1967, seperti dikutip Soetarso (1993) pelayanan sosial didefinisikan sebagai suatu fungsi yang terorganisasi, merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Pokok pikiran dari definisi tersebut adalah (1) adanya sekumpulan kegiatan yang terorganisasi, dan (2) kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberi kemampuan kepada orang (individu maupun kolektif) dalam mengatasi masalah.

Kemudian menurut Walter A. Fredlander (1967) pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi Fredlander ini selain memasukkan unsur tujuan pelayanan sosial juga sudah memasukkan unsur lembaga sosial sebagai bagian dalam pelayanan sosial. Fredlander menegaskan bahwa pelayanan sosial dimaksudkan untuk membantu perorangan atau kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan meningkatkan kesejahteraan. Definisi ini sudah lebih mencerminkan perkembangan pelayanan sosial di Amerika Serikat seperti dikemukakan Neil Gilbert and Harry Specht.

Dalam *The Social Work Dictionary* (1999), konsep pelayanan sosial didefinisikan sebagai: aktivitas pekerja sosial dan profesi lain dalam rangka membantu orang agar berkecukupan, mencegah ketergantungan, memperkuat relasi

keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Definisi ini menunjuk kepada: tujuan, aktivitas dan profesi. Tujuan pelayanan sosial menurut definisi ini sama seperti definisi PBB dan Fredlander, yaitu: membantu orang memperbaiki kualitas hidup. Perbedaannya, definisi dalam *Dictionary* ini merinci bentuk bantuan menjadi mencegah ketergantungan, memperkuat relasi keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial. Unsur lainnya adalah aktivitas dan pekerja sosial. Kedua unsur tersebut menekankan pada adanya aktivitas yang dilakukan oleh pekerja sosial dan profesi lain. Hal tersebut mengandung makna bahwa kegiatan pelayanan sosial dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai pekerja sosial (*social worker*) maupun profesi lainnya.

Berdasarkan ketiga definisi di atas unsur penting yang dapat ditangkap adalah bahwa: pelayanan sosial bertujuan untuk membantu orang mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidupnya; sasaran pelayanan sosial adalah orang sebagai perseorangan maupun dalam arti kolektif (keluarga, kelompok atau komunitas/masyarakat); membantu tidak berarti membuat orang yang dibantu menjadi tergantung, melainkan membuat orang memiliki kemampuan memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam konteks penelitian ini pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh profesi pekerjaan sosial. Pelayanan sosial sebagai kegiatan pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi mengandung makna bahwa pelayanan dimaksud dilakukan berdasarkan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial. Salah satu nilai profesi pekerjaan sosial yang membuatnya unik adalah penghargaan atas martabat kemanusiaan setiap orang manusia tanpa membedakan latar belakang etnis, ras, suku bangsa, agama/kepercayaan maupun keyakinan politik.

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial sebagai profesi adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi di antara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai mereka. (Soetarso, 1977:4). Pekerjaan Sosial meninjau sesuatu masalah bukannya sebagai

atribut orang melainkan atribut situasi sosial, di mana orang itu berada atau terlibat. Permasalahannya bukan siapa yang mempunyai masalah tetapi bagaimana unsur-unsur di dalam situasi sosial, termasuk karakteristik orang-orang dalam situasi ini saling berinteraksi sehingga mengganggu orang dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan mereka (Soetarso, 1977:4).

Inti sasaran atau fokus profesi ini adalah interaksi di antara orang dengan sistem sumber di lingkungan sosial mereka. Orang menggantungkan dirinya pada sistem-sistem ini untuk memperoleh sumber-sumber materiil, emosional, spiritual dan pelayanan-pelayanan serta kesempatan-kesempatan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka dan juga membantu mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan mereka.

Tujuan pelayanan sosial sebagai kegiatan praktek Pekerjaan Sosial dijabarkan oleh Allen Pincus dan Anne Minahan (1973), seperti disadur oleh Soetarso (1977:4) menjadi empat, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
2. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkannya.
3. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
4. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial.

Menurut fungsinya pelayanan sosial dapat dibedakan menjadi lima, (Soetarso, 1977), yaitu:

- 1). *Pencegahan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak masalah bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas.
- 2). *Rehabilitasi*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan memulihkan kehidupan

masyarakat, pembangunan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan fasilitas publik.

- 3). *Pengembangan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan.
- 4). *Perlindungan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan.
- 5). *Suportif*, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan sektor terkait.

Nilai utama pekerjaan sosial adalah penghargaan atas setiap orang sebagai manusia bermartabat. Pelayanan sosial menurut sifat teknis pelaksanaan meliputi pelayanan langsung (*direct services*) maupun tidak langsung (*indirect services*). Pelayanan langsung, dilakukan dengan empat metode utama, yaitu:

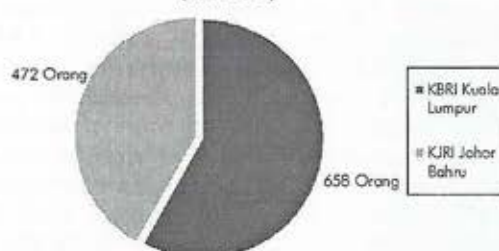
1. *Social Casework*, yaitu metode pekerjaan sosial khusus untuk pelayanan individu dan keluarga.
2. *Social Group Work*, yaitu metode pekerjaan sosial khusus untuk kelompok.
3. *Community Organization/Community Development*, yaitu metode pelayanan pekerjaan sosial khusus untuk organisasi dan masyarakat.
4. *Social work Generalis*, yaitu metode pekerjaan sosial yang mengintegrasikan pelayanan individu, keluarga, kelompok, organisasi/masyarakat sebagai suatu kesatuan.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Jumlah pekerja migran wanita Indonesia bermasalah yang ditampung di penampungan sementara KBRI di Kuala Lumpur maupun shelter KJRI Johor Bahru selalu berubah. Perubahan terjadi karena keberadaan pekerja migran di sana hanya untuk sementara, selalu ada yang keluar (pulang ke tanah air atau kembali ke majikan) dan selalu ada yang masuk penampungan. Sepanjang tahun 2006 kedua shelter kantor perwakilan Indonesia tersebut melayani sebanyak 1.130 orang pekerja migran bermasalah; terdiri dari shelter KBRI sebanyak 658 orang dan shelter KJRI sebanyak 472 orang. Akan tetapi sulit untuk menangkap

Banyaknya TKI bermasalah yang dilayani di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru Malaysia (Thn 2006)

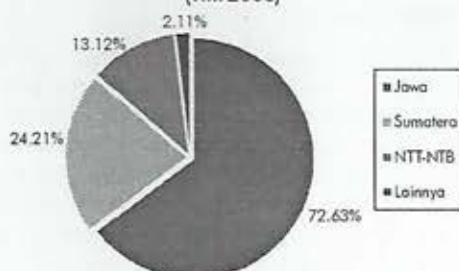


makna dari angka tersebut karena tidak ada data lengkap pekerja migran di Malaysia, sehingga tidak dapat disimpulkan kecenderungan pekerja migran bermasalah lebih sering terjadi di wilayah yurisdiksi KBRI atau di wilayah yurisdiksi KJRI Johor Bahru.

Di shelter KBRI Kuala Lumpur pada pengumpulan data tahap pertama terdapat sebanyak 86 orang pekerja migran bermasalah, dan pada tahap kedua meningkat menjadi 118 orang. Sepanjang periode 1 Januari 2007 sampai 5 Juni 2007 di penampungan ini telah diterima sebanyak 344 orang. Sebanyak 258 orang telah selesai diproses, seluruhnya dipulangkan ke tanah air. Sementara itu, di shelter KJRI Johor Bahru pada pengumpulan data tahap pertama, terdapat sebanyak 30 orang pekerja migran bermasalah, dan pada tahap kedua berkurang menjadi 27 orang.

Dari 113 responden di kedua shelter, diketahui bahwa sebagian besar pekerja migran bermasalah berasal dari Pulau Jawa (72,63%); lainnya dari Pulau Sumatra (24,21%) dan NTT (13,12%) (lihat diagram). Angka ini semata-mata menggambarkan keadaan ketika itu, tidak

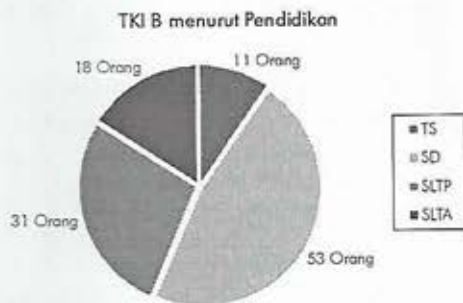
Banyaknya TKI bermasalah yang dilayani di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru Malaysia (Thn 2006)



dapat dilihat mewakili atau mencerminkan gambaran sepanjang waktu atau bahkan mencerminkan rasio pekerja migran di Malaysia. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa TKI berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia, walau dengan kuantitas yang berbeda.

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah berpendidikan rendah yaitu, tamat Sekolah Dasar (SD) 53 orang dan tidak tamat SD atau Tidak sekolah (TS) 11 orang lainnya tamat SLTP 31 orang dan tamat SLTA 18 orang. Hal ini sedikit banyak merupakan gambaran kualitas TKI yang bekerja di luar negeri ternyata dari mereka berpendidikan sangat rendah, bahkan terdapat yang sama sekali tidak pernah bersekolah, tidak bisa baca tulis. dalam perjalanan menuju Kuala Lumpur, di pesawat, seorang TKI yang kebetulan duduk di depan penulis minta bantuan kepada penulis untuk mengisi formulir tujuan kunjungan ke Malaysia. Dia beruntung walau tidak bisa baca tulis, sudah bekerja 5 tahun di Malaysia, sejak tahun ketiga setiap tahun bolak balik sendiri tanpa masalah.

Menurut status perkawinannya, dari 113 orang responden, pekerja migran sudah menikah dan belum menikah nyaris seimbang yaitu 48 orang dan 47 orang. Sedangkan 18 orang lainnya adalah janda.



Motivasi utama mereka menjadi TKI adalah untuk mencari uang untuk berbagai tujuan seperti membangun rumah, biaya pendidikan (untuk anak bagi yang sudah berumah tangga, atau bagi adik atau bagi diri sendiri bagi yang masih muda), membayar utang, memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari (lihat contoh kasus: Pipin di bawah). Selain itu terdapat sejumlah TKI atau pekerja migran pergi dengan motivasi "lari dari masalah dalam keluarga".

B. Masalah Pekerja Migran di Tempat Bekerja di Negara Tujuan

1. Bentuk masalah

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari KBRI dan KJRI, tampak bahwa masalah yang dialami oleh para pekerja migran adalah: diusir majikan, diserahkan oleh imigresen malaysia, lari dari majikan karena dianiaya, tidak mendapat gaji, lari dari majikan, keluar dari rumah majikan karena disuruh memandikan anjing, kerja dipindah-pindah, diserahkan kembali oleh majikan kepada agen dan dipukuli oleh agen, lari dari majikan karena selalu dimarahi, dipukul majikan, diserahkan majikan ke KBRI, disekap agen (selama waktu tertentu), diperkosa majikan, lari dari agen, korban trafficking, disiksa majikan, penganiayaan, penipuan kerja atau ditipu, korban pelecehan seksual, didera majikan. Klasifikasi bentuk masalah seperti ini tampak belum didasarkan pada satu landasan secara konsisten.

Mencermati klasifikasi ini tampak bahwa klasifikasi bentuk masalah didasarkan pada dua landasan yang digunakan secara acak, yaitu: proses kedatangan TKI ke KBRI atau KJRI (misalnya: diantar imigresen Malaysia, diantar majikan); landasan kedua adalah, alasan atau masalah yang mendorong pekerja migran meninggalkan rumah majikan (misalnya: disiksa, didera, diperkosa).

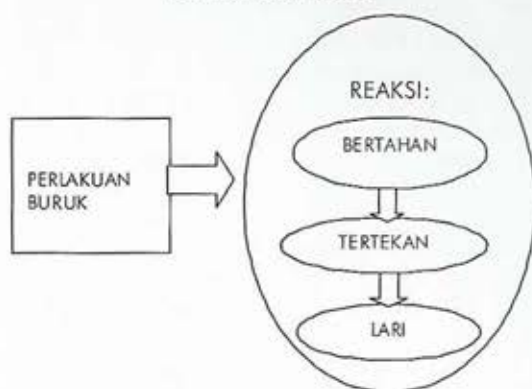
Dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sosial bagi pekerja migran kiranya klasifikasi kedua lebih relevan, karena langsung mencerminkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan data primer, hasil wawancara mendalam dengan para pekerja migran dan penulisan pengalaman pribadi oleh pekerja migran, masalah yang dialami mereka secara keseluruhan dapat dikategorikan dalam satu kelompok yaitu perlakuan buruk oleh majikan (lihat Anwar Sitepu dalam Jurnal Litbang Kesos Vol 12 No.3, 2007: 57). "Perlakuan buruk majikan" merupakan masalah inti bagi setiap pekerja migran yang datang minta

perlindungan di KBRI. Bentuk-bentuk perlakuan buruk yang dimaksud meliputi:

- a. Memberi beban kerja terlalu berat (melampaui batas kemampuan pekerja),
- b. Tindak kekerasan fisik dan non fisik,
- c. Tidak memenuhi kebutuhan pokok,
- d. Tidak membayar gaji,
- e. Memaksa bekerja melampaui masa kontrak secara tidak bertanggung jawab,
- f. Melakukan pemerkosaan/pelecehan seksual,
- g. Menghalangi hak berkomunikasi dengan keluarga, dan
- h. Menghalangi hak menjalankan ibadah.

Pada umumnya masalah pekerja migran bersifat komplikatif, meliputi lebih dari satu bentuk masalah. Tidak membayar gaji, misalnya, biasanya dilakukan majikan sekaligus untuk mempertahankan pekerja migran bekerja melebihi masa kontrak; memberi beban kerja terlalu berat (melampaui batas kemampuan pekerja), biasanya diiringi tindak kekerasan fisik dan non fisik serta tidak memenuhi kebutuhan pokok. (lihat contoh kasus Pipin alinea 4, terlampir)

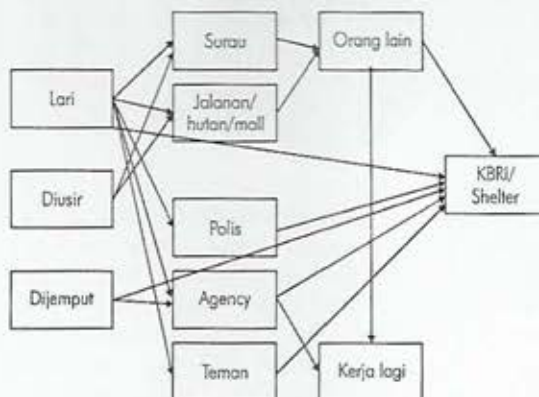
Bagan Reaksi Individual TKI Ketika Mendapat Perlakuan Buruk Dari Majikan Di Tempat Kerja



2. Reaksi Pekerja Migran atas Perlakuan Buruk Majikan

Menghadapi perlakuan buruk dari majikan para pekerja migran biasanya mengalami dilema, bingung, antara tetap bertahan atau meninggalkan rumah majikan. Pola umum yang dilakukan pekerja migran adalah: pertama, berusaha bertahan sekuat tenaga, dan kemudian melarikan diri ketika merasa sudah sangat tidak sanggup lagi bertahan. Pekerja migran pada awalnya bertahan sekuat tenaga dengan pertimbangan bahwa: 1) apabila lari dari majikan maka status mereka akan menjadi ilegal; jika itu terjadi maka resiko lebih besar siap mengancam; 2) datang ke Malaysia untuk mencari uang, karena itu harus diperjuangkan walaupun menuntut pengorbanan tenaga dan perasaan; 3) lari berarti tidak mendapat uang; 4) malu pulang tanpa bawa uang; 5) tidak tahu jalan dan tidak tahu tujuan; 6) tidak ada saudara yang dapat diminta pertolongannya. Dampak permasalahan yang dialami dirasakan sebagai tekanan berat bagi individu TKI sehingga muncul dalam bentuk frustrasi, stress, trauma, depresi. Pola lain adalah TKI tetap bertahan (tidak lari) sampai menjadi korban, meninggal karena tersiksa atau bunuh diri atau diusir, dibuang, dipulangkan atau diterlantarkan.

Pola TKI Meninggalkan Rumah Majikan Sampai Ke Shelter Penampungan



TKI bermasalah yang ditampung sementara di KBRI keluar dari rumah majikan dan tiba di KBRI/KJRI dengan tiga pola utama, yaitu: lari, diusir, atau dijemput. Masing-masing pola memiliki resiko yang sulit diprediksi.

▪ Lari

Lari berarti TKI secara sepihak memutuskan pergi dari rumah majikan tanpa persetujuan majikan. Persoalan yang banyak terjadi adalah TKI yang bersangkutan tidak tahu harus pergi ke mana. Biasanya TKI tidak berpikir panjang lagi, yang penting keluar dari rumah majikan. Setelah di jalan baru bingung mau pergi ke mana. Biasanya TKI pergi ke surau, ditangkap polis, "ditolong" orang lain yang ketemu di jalan. Dalam banyak kasus TKI dibantu oleh orang lain.

▪ Diusir/dibuang/dipulangkan langsung/diterlantarkan

Biasanya TKI diajak majikan pergi ke suatu tempat, kemudian ditinggal begitu saja di jalan. Menurut pengamatan hal tersebut biasanya dilakukan majikan untuk menghindari pembayaran gaji, atau karena jengkel. Modus lain TKI ditinggal di rumah kontrakan yang sudah habis masa kontraknya.

▪ Dijemput oleh staf KBRI/Polisi Malaysia/Agency

Terdapat juga sejumlah TKI yang keluar dari rumah majikan dengan cara dijemput oleh staf KBRI, Polisi Malaysia, Agency atau teman. Jika seorang TKI merasa sudah tidak mampu bekerja di rumah majikannya, yang bersangkutan dapat saja minta pertolongan staf KBRI atau agency atau pihak lain untuk menjemputnya. Akan tetapi pola ini hanya terjadi pada beberapa kasus. KBRI hanya menjemput beberapa TKI, persoalannya kebanyakan TKI tidak bisa menghubungi KBRI karena tidak tahu, atau tidak memiliki nomor telepon. Ada kasus di mana TKI pada

akhirnya bisa menghubungi KBRI karena secara kebetulan menemukan nomor telepon KBRI dari koran di tempat sampah.

3. Pola Pemicu Masalah

Mencermati masalah yang ada, dapat diketahui bahwa ada dua pola pemicu munculnya permasalahan antara pekerja migran dan majikannya yaitu:

▪ Pertama, majikan merasa kecewa dengan kinerja pekerja kemudian memperlakukan pekerja dengan buruk. Bentuk perlakuan buruk majikan terhadap pekerja migran meliputi tindak kekerasan fisik maupun psikologik atau gabungan keduanya.

▪ Kedua, majikan tidak kecewa atau bahkan puas dengan kinerja pekerja, kemudian berusaha mempertahankan dengan cara yang tidak fair atau berusaha mengingkari kewajiban membayar gaji.

Pada pola pertama masalah dipicu oleh kesenjangan antara kinerja pekerja dengan harapan majikan. Pada satu sisi majikan mengharapkan kehadiran pekerja dapat membantunya secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai standar yang dia inginkan. Pada sisi lain dapat terjadi kinerja pekerja secara objektif masih rendah, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga tuntutan atau harapan majikan terlalu tinggi, jauh melampaui kontrak kerja. (Ada banyak kasus tentang hal ini).

Kesenjangan antara kinerja pekerja dengan harapan majikan akan semakin lebar apabila sebelum ditempatkan, pekerja tidak dipersiapkan dengan baik. Hal tersebut dapat dipahami karena perbedaan latar belakang sosial budaya masing-masing. Pekerja pada umumnya berpendidikan rendah (SD), belum berpengalaman kerja, berasal dari keluarga miskin, mayoritas dari pedesaan. Sedangkan, majikan para pekerja pada umumnya adalah keluarga yang relative sukses secara ekonomi (salah satu indikasinya adalah mereka sanggup membayar jasa agency untuk peng-

ambilan pekerja sebesar antara RM 3.000 sampai RM 5.000 setara Rp.7,5 juta sampai Rp.12,5 juta) dan pekerja keras. Mereka pada umumnya adalah keluarga keturunan Cina, hanya sebagian kecil keturunan India, tinggal di kota, bekerja sebagai pengusaha, sehingga bisa dimengerti kalau mereka sangat memperhitungkan kinerja (waktu, biaya dan produksi), dan menganut kepercayaan yang berbeda dengan pekerja migran.

Perbedaan latar belakang demikian menimbulkan benturan, contohnya: dalam hal standar kebersihan, banyak pekerja bingung, "sudah disapu masih disuruh ulang". Sementara majikan merasa dibohongi, "apa yang kamu kerjakan?"; dalam pola kerja, pekerja tampaknya terbiasa dengan "gaya santai", mereka mengatakan: "tidak ada rehat", sementara majikan "maunya cepat-cepat, rapi dan bersih". Hal lain yang ikut mempersulit keadaan yang bersumber dari perbedaan sosial budaya adalah: bahasa, agama dan makanan. Dalam hal bahasa, harus diakui walau pun bahasa Indonesia berakar dari akar yang sama dengan bahasa Malaysia tetapi dalam praktek banyak yang berbeda. Dalam hal agama, banyak majikan tidak mengijinkan pekerja migran melaksanakan sembahyang lima waktu pada hal bagi pekerja migran hal tersebut adalah kewajiban. Dalam hal makanan, majikan biasa mengonsumsi daging babi, sedangkan pekerja memandang daging babi sebagai barang haram.

Pada pola kedua, masalah dipicu oleh sikap egoistik majikan, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli kepentingan pekerja. Cara-cara yang ditempuh majikan adalah: tidak membayar gaji, menahan paspor, tidak memperpanjang paspor kemudian menakuti-nakuti pekerja dengan mengatakan "kamu haram, paspormu sudah *expite*". Kecurangan lain adalah menuduh pekerja melakukan sesuatu kesalahan, misalnya membuat tuduhan palsu memukul anak, merusak barang, mencuri, memalsukan kuitansi pembayaran gaji, bahkan memutar balikkan

fakta menuntut pekerja migran membayar kompensasi karena sudah "menikmati" suaminya. Cara lain adalah berusaha memulangkan pekerja dengan diantar langsung ke pelabuhan/bandara, biasanya pekerja migran hanya dibekali tiket dan sedikit uang, sementara gajinya tidak dibayar.

Masalah kemudian menjadi semakin kompleks karena dua hal, yaitu: Pertama, pekerja migran yang merasa tertekan tidak mengerti cara membela diri. Kedua, tidak ada pihak lain yang datang memberi pertolongan. Akibat situasi demikian pekerja migran berada dalam situasi amat dilematis antara tetap bertahan dan melarikan diri. Menurut kasus-kasus yang ditemukan, menghadapi situasi demikian, pekerja migran akan bertindak sebagai berikut: Pertama, berupaya bertahan dengan menyesuaikan diri, menekan perasaan diperlakukan tidak adil, menuruti kehendak majikan, bekerja lebih keras. Sikap demikian dikembangkan dengan penuh kesadaran dengan pertimbangan, apabila lari resiko sangat besar, menjadi ilegal, tujuan mencari uang gagal, malu pulang tanpa hasil. Kedua, setelah tidak sanggup bertahan baru melarikan diri. Adanya kasus TKI (pekerja migran) stress, depresi, "gila" atau bahkan bunuh diri atau sebaliknya membunuh majikan merupakan reaksi atas tekanan yang dirasakan demikian hebat.

4. Sumber Masalah

Menyimak lebih dalam, permasalahan pekerja migran bersumber dari dua hal yang saling terkait, yaitu: rendahnya kualitas diri individu pekerja migran itu sendiri dan sistem atau mata rantai perekrutan, penyiapan, penempatan dan perlindungannya yang kurang manusiawi. Sistem dimaksud melibatkan, calo atau biasa disebut sponsor, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia biasa disingkat PJTKI, agen penyalur di Malaysia atau biasa disebut Agency, dan Majikan. Menurut lokasinya sumber utama permasalahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu di atau dari dalam

negeri dan di atau dari luar negeri. Di/dari dalam negeri meliputi: individu TKI dan keluarganya, calo/sponsor, PJTKI. Selain komponen utama tersebut juga melibatkan aparat pemerintah seperti Lurah, Imigrasi, Depnaker. Selain itu masalah juga bersumber dari kondisi di Negara setempat, baik majikan maupun agency.

TKI yang kurang pengalaman, kurang keterampilan dan berpendidikan rendah serta miskin dimotivasi oleh calon/sponsor untuk mau menjadi TKI. Calon TKI yang hidup miskin sangat tertarik menjadi TKI untuk membebaskan diri dan keluarganya dari penderitaan atau himpitan kemiskinan dalam waktu singkat. Sponsor memperoleh penghasilan dari PJTKI berdasarkan banyaknya calon TKI yang berhasil dibujuk dan diserahkan ke PJTKI. Dalam upaya memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya, sponsor berupaya keras menjaring sebanyak-banyaknya calon TKI. Penjaringan dilakukan dengan menyebar informasi menarik, gaji besar, tanpa diimbangi dengan informasi memadai tentang beban kerja yang akan menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga PJTKI memperoleh penghasilan sesuai banyaknya TKI yang disalurkan ke Agency di Malaysia. Karena itu untuk memperoleh penghasilan sebesar-besarnya mendayagunakan sponsor secara optimal, calon TKI ditekan, biaya dibengkakkan dan dibebankan kepada TKI. Akibatnya TKI menanggung biaya dalam jumlah besar, yang dipotong dari gajinya kelak bila sudah bekerja. Apabila calon TKI mau mundur/membatalkan niatnya yang bersangkutan diminta membayar dalam jumlah besar, jauh di luar kemampuan, akibatnya calon TKI tidak bisa mundur.

C. Pelayanan Sosial Pekerja Migran di KBRI dan KJRI

1. Jenis Pelayanan

Sampai sejauh ini, perwakilan pemerintah Indonesia (KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bharu) di Malaysia telah membantu pekerja migran bermasalah dengan menyelenggarakan berbagai

bentuk pelayanan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Pelayanan kebutuhan pokok, meliputi: penampungan sementara, pangan, sandang, pengobatan, dan spiritual.
- Penyelesaian kasus, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membantu pekerja migran memperoleh hak-haknya, seperti gaji dan atau kompensasi. Pelayanan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari negosiasi langsung dengan majikan sampai advokasi di depan pengadilan.
- Penjangkauan, yaitu "penjemputan" atas pekerja migran di tempat kerja, di kantor polisi atau tempat lain. Pelayanan ini dilakukan secara sporadis, dalam arti apabila ada permintaan. Dalam prakteknya hanya sejumlah sangat kecil pekerja migran dijemput, lainnya tiba di KBRI/KJRI atas bantuan orang lain atau upaya TKI sendiri.
- Pemulangan, yaitu pengiriman pekerja migran kembali ke keluarganya di tanah air.

2. Proses Pelayanan

Menurut prosesnya pelayanan KBRI maupun KJRI bagi pekerja migran bermasalah, dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- Penerimaan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan identitas pekerja migran sebagai warga negara Indonesia.
- Pemahaman masalah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah setiap pekerja migran.
- Pemecahan masalah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membantu pekerja migran memperoleh hak-haknya.
- Pemulangan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan pekerja migran ke tanah air.

3. Hambatan dalam Pelayanan

Hambatan yang dapat diidentifikasi dalam pelayanan pekerja migran bermasalah, terdiri dari:

- Hambatan yang berasal dari pekerja migran, antara lain: tidak memiliki dokumen apapun untuk menunjukan dirinya sebagai warga negara Indonesia; tidak tahu identitas majikan dan agencynya; tidak dapat berkomunikasi, karena tekanan psikologis, stress atau bahkan depresi.
- Hambatan berasal dari KBRI/KJRI, antara lain: keterbatasan jumlah personil, pengetahuan dan pengalaman personil; dan tidak memiliki data penempatan pekerja migran.
- Hambatan pada proses pemu-
langan. Instansi pemerintah yang bertugas menerima pekerja migran bermasalah di pelabuhan terdekat seringkali tidak siap.

V. ANALISIS KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL

Mencermati hasil penelitian seperti diuraikan di atas, mulai dari bentuk-bentuk perlakuan buruk majikan atau agency terhadap pekerja migran, pola pemicu dan sumber masalahnya serta reaksi pekerja migran dan pola pekerja migran keluar dari rumah majikan sampai tiba di shelter penampungan sementara di KBRI atau KJRI maka kebutuhan pelayanan sosial bagi pekerja migran yang dipandang perlu dilakukan di Negara tujuan (luar negeri) adalah meliputi fungsi: pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan. Selain itu pelayanan sosial yang juga sangat mendesak dilakukan adalah fungsi penyelamatan, *rescue*.

- 1). Fungsi pencegahan (*preventif*). Pencegahan dapat dilakukan pada saat pra penempatan dan pasca penempatan. Pada saat pra penempatan harus dipastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan secara adil dan dipahami dengan jelas oleh kedua pihak. Majikan harus dipastikan mampu dan bersedia membayar gaji

pekerjanya dan bersedia menghormati isi kontrak kerja, karena itu perlu dilakukan pengujian sebelum penempatan TKI. Pada pihak lain, pekerja migran harus dipastikan mengetahui hak dan kewajibannya. Pekerja migran harus dipastikan sanggup melakukan pekerjaan yang disepakati.

Pada pasca penempatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala ke tempat pekerja migran bekerja (rumah majikan). Pemantauan bukan sekedar memonitor pekerja migran tetapi sekaligus memberi bimbingan bagi kedua belah pihak jika ada indikasi permasalahan. Pemantauan berkala juga berfungsi sebagai sarana dukungan moral bagi TKI.

- 2). Fungsi penyelamatan (*rescue*). Fungsi ini dilakukan terhadap TKI yang menjadi korban tindak kekerasan di rumah majikan. TKI yang bersangkutan harus dijemput dan ditempatkan di rumah/shelter perlindungan sementara. Berdasarkan informasi dari sejumlah TKI diperkirakan terdapat banyak TKI yang masih berada di rumah majikan dalam situasi sangat tertekan. Mereka tidak dapat melarikan diri/keluar dari rumah majikan karena tidak tahu jalan, atau tidak ada peluang.
- 3). Fungsi rehabilitasi (*rehabilitatif*). Fungsi ini dilakukan bagi TKI yang sudah terlanjur menjadi korban dan berada di shelter. Kondisi korban (TKI bermasalah) yang sudah berada di shelter cukup bervariasi, dapat dikategorikan menjadi: korban "luka" parah, ringan, atau sehat. Luka dalam hal ini tidak saja fisik tetapi juga psikososial. Jika TKI menderita luka fisik harus dipastikan mendapat perawatan memadai, jika menderita luka psikologis harus diupayakan agar memperoleh pertolongan sebelum pulang ke keluarganya di tanah air.
- 4). Fungsi perlindungan (*protectif*). Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan MoU pemerintah Indonesia dengan negara tujuan sehingga lebih berpihak kepada TKI.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian di atas adalah:

- Masalah utama pekerja migran di negara tujuan adalah perlakuan buruk oleh majikan maupun agency. Bentuk-bentuk permasalahan pekerja migran belum diklasifikasikan dengan baku. Pekerja migran yang diperlakukan buruk tidak hanya mereka yang kurang terampil bekerja tetapi juga pekerja migran yang memiliki kinerja baik.
- Pelayanan kantor perwakilan Indonesia di Malaysia (KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru) bagi pekerja migran belum dilakukan optimal dalam arti masih terdapat permasalahan yang belum disentuh. Pelayanan yang diselenggarakan masih sebatas penyelesaian administratif, hak ekonomi dan hukum. Sementara pelayanan yang bersifat psikososial (pemulihan harkat dan martabat pekerja migran sebagai manusia yang memiliki harga diri) belum disentuh secara khusus.

B. Rekomendasi

Dalam upaya membantu penyelesaian masalah pekerja migran secara konstruktif, Departemen Sosial perlu melakukan kegiatan-kegiatan:

- Penyuluhan sosial di daerah asal, dengan tujuan memberi pengetahuan kepada masyarakat luas agar mengerti proses menjadi pekerja migran, bahaya yang mengancam dan teknis menyelamatkan diri.
- Pendampingan sosial bagi pekerja migran sejak dan selama mempersiapkan diri di daerah asal sampai masa penempatan di negara tujuan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pekerja sosial dengan modal manajemen kasus (*case management*), sehingga setiap orang pekerja migran didampingi oleh pekerja sosial manajer kasus, mulai pada saat memutuskan pilihan menjadi pekerja migran, mempersiapkan segala sesuatu sebelum berangkat, baik persiapan administratif maupun persiapan sosial psikologis. Dalam kaitan masalah administratif, manajer kasus harus memastikan, setiap pekerja migran berangkat dengan administrasi yang lengkap, melalui proses yang benar dan yang sangat penting mencegah TKI mendapat tekanan atau jeratan ekonomi sebelum berangkat. Dalam hal ini kemungkinan besar TKI butuh bantuan sosial, apabila Dit. KTK & PM dapat mengadakan "pinjaman sangat lunak" akan sangat membantu. Dalam hal persiapan sosial-psikologis, seorang pekerja sosial pendamping (*case manager*) harus memastikan setiap TKI berangkat dengan motivasi yang benar, bukan sebagai pelarian; memastikan anak dan suami yang ditinggal berada dalam keadaan "aman", anak tidak terlantar atau terancam keselamatannya, suami tidak mudah "tergelincir". Dit. KTK & PM dapat melakukan hal ini dengan bekerjasama dengan LSM atau menempatkan pekerja sosial di daerah asal maupun di negara tujuan.
- Bantuan sosial reintegrasi keluarga, meliputi: rehabilitasi sosial-psikologis khususnya bagi pekerja migran yang menderita stress atau depresi dan persiapan sosial bagi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilbert, Neil and Specht, Harry (ed); *Handbook Of Social Services*; Prentice-Hall, Inc., Englewood, New Jersey, US
- Karen K.Kirst-Ashman and Grafton H.Hull, Jr; *Understanding Generalist Practice*: 507)
- MoU Pemerintah Indonesia dan Malaysia ditandatangani di Bali 13 Mei 2006.
- Soetarso, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial, STKS Bandung, 1993

Soetarso, *Praktek Pekerjaan Sosial, Jilid I, Cetakan Ke-3, STKS Bandung, 1997*

Sitepu, Anwar, dkk, *Laporan sementara Penelitian Pelayanan Sosial bagi TKI bermasalah, trip III, Puslitbang Kesos, Jakarta, 2007*

Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, Direktorat Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Depsos RI, Jakarta, 2004:8

....., *The Social Work Dictionary, 1999*

Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, 1995, seperti dikutip oleh Wirda Abdullah, Penelitian Pengembangan Metode dan Teknik Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan, 1997:3)

BIODATA PENULIS :

Anwar Sitepu, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, memperoleh gelar magister dari program studi pengembangan masyarakat pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN: Kasus Pipin

Pipin, seorang gadis, masih sangat muda, belum genap 19 tahun, lahir 9 Agustus 1988. Dia hanya tammat SD, beragama Islam. Dikirim ke Malaysia oleh sebuah PJTKI di Jakarta Timur dengan dokumen lengkap. Sebelum berangkat dilatih keterampilan ngepel lantai, gosok baju dan cuci mobil. Berada di PJTKI selama 3 bulan. Bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, terhitung 1 Januari 2004, dengan kontrak kerja tertulis. Namun pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, yang dijanjikan satu rumah ternyata oleh majikan dipaksa bekerja di dua rumah dan juga bekerja di salon milik majikan. Sebelum ke Malaysia - ketika umurnya belum genap 13 tahun - Pipin sudah harus bekerja, menjadi PRT di Jakarta. Di majikan pertama selama setahun dan di majikan kedua selama dua tahun. Pada usia 16 tahun Pipin mengadu nasib ke Malaysia. Di Malaysia dia sudah bekerja selama 30 bulan, melebihi kontrak kerjanya. Kemudian melarikan diri dari rumah majikan, dan masuk shelter sejak 4 Juni 2007. Selama di shelter Pipin merasa aman tapi mengeluhkan makanan, katanya: "lauknya kurang". Berikut adalah ungkapan pengalaman dan perasaan Pipin yang ditulisnya sendiri.

Assalam muallikum Wr. Wb, nama saya Pipin R, berasal dari Kampung Cbl, Desa Mgiy, Kecamatan Lemahsugi, Majalengka, Jawa Barat. Kepergianku jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia ini ingin mengubah hidup. Aku berumur 16 tahun (ketika itu – pen), menginjakkan kaki dari rumah yang sangat miskin. Aku meminta izin sama nenek yang membesarkan aku dari kecil. Sejak bayi, aku ditinggalkan mama, diumur yang sangat muda. Aku merasakan kesedihan yang sangat mendalam lahir maupun batin. Di umur 12 tahun, ketika lulus dari sekolah SD, aku mulai bekerja di rumah orang di Jakarta. Aku mulai meninggalkan rumah nenek, mau gak mau aku harus pergi karena keadaan yang serba kekurangan, walaupun keinginan meneruskan sekolah sangat besar. Apa boleh buat, jangankan meneruskan sekolah makanpun kami kesusahan. Di situlah mulai ada keinginan bekerja di Jakarta. Dari umur 12 tahun sampai 16 tahun aku bekerja di Jakarta. Pada umur 16 tahun aku meminta ijin sama nenek untuk kerja di Malaysia. Mula-mula nenek menentang, tapi akhirnya nenek memberikan ijin. Aku pergi walaupun dia menangis karena sangat takut akan keadaan yang akan terjadi di Malaysia, entah itu baik atau buruk kerjanya. Perasaan sendiri tak tega tapi tak ada jalan keluarnya. Aku harus pergi bekerja di negara sebelah. Setiap hari, setiap malam kulihat air mata nenek berlinang-linang di dua bola matanya. Kucoba membuat ia tersenyum. Sampai waktunya aku berangkat ke Malaysia. Disitulah aku mengeluarkan air mata yang betul-betul, aku rasa disini waktunya aku berpisah dari orang yang aku anggap sangat berharga, dibandingkan emas ataupun permata yang mahal harganya, nenek lebih berharga. Aku pergi ke Malaysia dengan penuh keyakinan akan berhasil.

Pertama kerja disana saya merasa asing karena tak pernah ikut orang Cina. Mula-mula saya kerja di sana boleh cocok, tapi lama-kelamaan dia kasih banyak kerjaan, rumah dua dan salon sedangkan saya sendiri, kerja satu orang. Pertama dia pukul saya, siksa saya, saya terkejut karena tidak pernah merasakan kekerasan dari orang yang membesarkan saya. Tapi saya sadar saya bukan sempurna pasti ada kelemahan. Bukan satu kali, tapi dua kali sampai saya merasa trauma terhadap pemukulan itu. Aku sedih sekali, tak tahu harus berbuat apa. Dulu waktu kerja di sana saya sudah putusn mau bunuh diri. Sampai saya bilang dalam hati lebih baik mati dari pada hidup di negara orang, disiksa. Saya minum tujuh butir obat panadol dicampur obat lap lantai/sabun. Banyak kali aku ulangi perbuatan itu, tapi saya masih hidup. Lama-kelamaan kucoba berhenti minum obat yang bisa membuat kepala saya cepatsakit, saya tahu ini tidak baik didalam badan dan diri saya. Selama 30 bulan saya kerja, dia belum bayar gaji saya. Dia bilang saya belum ada gaji sampai dia panggil tambah kontrak, saya punya kontrak kerja tapi saya sudah tidak tahan. Lalu saya lari dari rumah majikan saya. Setiap malam dia kasih kerja sangat banyak, pukul tiga pagi tidur, bangun harus pukul enam pagi. Kerja di rumah majikan, dan di rumah adiknya, pukul 11 siang saya harus pergi kedai salon untuk bersihkan salon, lalu cuci rambut setiap orang yang datang ke salon. Sudah bekerja tanpa istirahat saya masih dimarah dan dipukul. Setiap dia pukul saya tak pernah namanya saya melawan atau membalikan kata-kata. Saya hanya bisa mengeluarkan air mata. Walaupun benda tajam bisa melukai saya tapi kucoba bertahan. Dalam hati aku mencoba menghibur diri: "nanti kalau balik, aku bawa duit banyak, saya bisa hidup bahagia sama nenek dan orang yang ku cintai". (Dalam kesempatan wawancara Pipin mengaku merasa sangat kecapekan bekerja di rumah majikan, "tak ada rehat" katanya. Setiap kecapean - untuk menghibur diri - dia ingat kata-kata neneknya yang sangat menyentuh. "Saya ingat, kata nenek saya, 'orang kerja tidak akan mati tapi orang tidak makan akan mati' ")

Tapi keyataanya saya pun lari karena tak tahan akan penganiayaan, pemukulan yang selalu dituju sama dia yaitu kepala. Akhirnya saya melarikan diri dari salon majikan saya. Naik bus tak tahu tujuan, lamanya satu jam dari Kelang ke Kuala Lumpur, di pasar saya nangis. (Ketika Pipin berada di pasar, dia bingung tidak tahu harus berbuat apa dan menangis, seseorang yang belakangan diketahui bernama Ani, perempuan asal Jawa, menaruh perhatian). Saya dibawa sama emba Ani dari Jawa. Lalu saya menceritakan tentang semua keadaan hidup saya. Di rumahnya, dia kasih saya baju, alat mandi, dan sebagainya. Dua hari di sana saya istirahat, lalu diajaknya saya ke KBRI untuk menyelesaikan masalah. Saya berharap sama bapak/ibu yang saya hormati mudah-mudahan bisa tolong saya dengan cepat karena nenek saya sakit parah. Saya kepingin jumpa sama beliau, hanya dia satu-satunya orang yang paling saya sayangi, saya ingin membalas budi atas jasa beliau yang telah membesarkan saya. Mudah-mudahan nenek tidak terkejut dengan keadaan saya yang sekarang. Bapak/Ibu yang saya hormati, saya minta pertolongan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Terima kasih atas yang engkau berikan sama kami semua disini.

Kuala Lumpur, 22 Juli 2007, Wassalam, Pipin